



Penerapan Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Kepuasan Publik (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire)

Lusiana¹, Amir Jaya², Sita Yubelina Sabandar³

¹⁾Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 02-07-2025 | Review 10-07-2025 | Revision 17-07-2025 | Accepted 21-07-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Kepuasan Publik. Obyek penelitian ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang mengetahui tentang pengguna sarana dan prasarana. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Penerapan manajemen sarana dan prasarana oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mencakup tahapan perencanaan berbasis kebutuhan dan anggaran, pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan yang mencakup distribusi, pemeliharaan, hingga pelaporan; Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire berupaya meningkatkan kepuasan publik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, penerapan inovasi pembelajaran, pembentukan karakter siswa, serta menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder; Penerapan manajemen sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya pemahaman tentang pentingnya sarana prasarana, serta kurangnya tenaga ahli yang kompeten.

Kata kunci: Penerapan, Sarana Prasarana, Kepuasan Publik, Dinas Pendidikan, Nabire

Abstract

This study aims to analyze the implementation of infrastructure and facilities management in enhancing public satisfaction, with the research object being the Education Office of Nabire Regency. A qualitative approach was employed, utilizing both primary and secondary data sources. Data collection methods included observation, interviews with six key informants—employees of the Nabire Education Office familiar with the use of infrastructure and facilities—and documentation. The data were analyzed using a qualitative descriptive method, involving data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of infrastructure and facilities management by the Nabire Education Office involves stages of need-based and budget-oriented planning, transparent and accountable procurement, and comprehensive management, including distribution, maintenance, and reporting. Efforts to improve public satisfaction are carried out through enhancing education quality, ensuring equitable access to education, strengthening teacher competencies, promoting learning innovations, fostering student character development, and building partnerships with various stakeholders. However, the implementation still faces several challenges, including limited budget, weak inter-agency coordination, low awareness of the importance of infrastructure, and a lack of competent experts.

Keywords: Implementation, Infrastructure and Facilities, Public Satisfaction, Education Office, Nabire.

¹E-mail: luziadin9@gmail.com

²E-mail: tikupasangsita@gmail.com

³E-mail: amirjaya0505@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu daerah, dan manajemen sarana prasarana pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Peraturan ini mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, sarana prasarana pendidikan didefinisikan sebagai semua fasilitas fisik dan non-fisik yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sarana prasarana mencakup: Gedung sekolah, Ruang kelas, Laboratorium, Perpustakaan, Fasilitas olahraga dan Alat dan bahan pembelajaran. Peraturan ini menekankan bahwa semua sarana prasarana harus memenuhi standar tertentu agar dapat digunakan secara efektif dalam proses pendidikan.

Obyek penelitian ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana Penerapan Manajemen Sarana Prasarana dalam Meningkatkan Kepuasan Publik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2023) berjudul "Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Nabire", ditemukan bahwa pengelolaan sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana prasarana dapat meningkatkan kepuasan publik, tetapi sering kali terhambat oleh keterbatasan informasi dan sumber daya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan manajemen sarana prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dan dampaknya terhadap kepuasan publik. Dengan mengidentifikasi masalah dan faktor penghambat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Nabire menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasi di lapangan. Masyarakat seringkali mengeluhkan kualitas sarana prasarana yang tidak memadai, yang berpengaruh terhadap pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana manajemen sarana prasarana dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan publik, serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nabire. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Manajemen Sarana Prasarana Dalam Meningkatkan Kepuasan Publik.

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana manajemen sarana prasarana diterapkan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih jelas bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan praktis untuk perbaikan manajemen sarana prasarana di Dinas Pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 15 orang terdiri dari 6 pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dan 10 orang Masyarakat di Kabupaten Nabire sebagai pengguna sarana dan prasarana. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Nabire menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kebijakan pemerintah daerah di sektor pendidikan dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan masyarakat adalah kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang dinilai masih sangat terbatas dan kurang memadai. Kondisi ini berdampak langsung terhadap proses dan pengalaman belajar siswa, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Banyak sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, peralatan belajar, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air bersih, listrik, serta jaringan internet. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua, siswa, maupun tenaga pendidik, karena menghambat pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Keluhan masyarakat juga menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam manajemen pengadaan dan distribusi sarana prasarana, baik dari aspek perencanaan, pengawasan, maupun transparansi anggaran. Observasi juga mencatat bahwa meskipun kebijakan terkait pengembangan sarana prasarana sudah ada di tingkat kabupaten, pelaksanaannya masih belum merata. Beberapa sekolah di pusat kota mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sementara sekolah di distrik-distrik luar kota masih tertinggal jauh. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola manajemen sarana prasarana pendidikan, termasuk efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis.

Melalui temuan ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas sarana prasarana bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut aspek manajerial, perencanaan berbasis data, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggali strategi manajemen yang lebih efektif dan inklusif, sehingga dapat meningkatkan kepuasan publik dan mendukung pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nabire.

Hasil wawancara dengan Informan 1, di simpulkan bahwa Penerapan manajemen sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan berbasis kebutuhan, pengadaan yang transparan, distribusi, pemeliharaan, hingga evaluasi berkelanjutan. Upaya ini terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kenyamanan belajar dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Dinas juga menunjukkan komitmen tinggi dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan akses, penguatan tenaga pendidik, pembentukan karakter siswa, dan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, rendahnya kesadaran akan pentingnya sarana prasarana, dan minimnya tenaga ahli yang kompeten. Evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan

perbaikan.Ke depan, dibutuhkan langkah strategis seperti optimalisasi pengelolaan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi SDM, serta pelibatan aktif masyarakat. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memperkuat kebijakan yang ada, penerapan manajemen sarana dan prasarana diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kepuasan publik di Kabupaten Nabire secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan sebagai dasar penyusunan program pengadaan yang tepat sasaran. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak terbukti sangat berpengaruh terhadap terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa dan guru.Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pemerataan fasilitas, terutama di wilayah terpencil. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Pendidikan mengandalkan perencanaan berbasis data dan melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana prasarana yang ada.Dukungan teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan dalam pengelolaan manajemen pendidikan, seperti untuk perencanaan, inventarisasi, pemantauan, dan pelaporan, sehingga proses menjadi lebih efisien dan transparan. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dalam mewujudkan sistem manajemen sarana dan prasarana yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3, dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire telah dirancang secara matang dan realistis, dengan menyesuaikan perencanaan pada ketersediaan anggaran serta memprioritaskan wilayah yang sangat membutuhkan. Pendekatan berbasis kebutuhan ini efektif dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa dan guru.Upaya pemerataan akses pendidikan juga menjadi fokus utama, terutama bagi daerah terpencil, melalui pembangunan unit sekolah baru dan distribusi peralatan pembelajaran. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antarinstansi masih menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaan program.Untuk memastikan efektivitas pengelolaan, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menggunakan instrumen seperti kuesioner dan daftar periksa. Evaluasi ini menjadi dasar dalam perencanaan lanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, prinsip transparansi dan efisiensi dijaga dalam seluruh proses pengadaan guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.Keberhasilan pengelolaan sarana prasarana juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan terus mendorong peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan dan penguatan manajemen, guna menciptakan sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan informan 4, peneliti dapat mengetahui bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nabire menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam proses pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme terbuka seperti tender umum dan pengadaan langsung. Ketersediaan fasilitas yang memadai memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan.Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mendorong inovasi pembelajaran dengan

memanfaatkan teknologi dan menerapkan kurikulum yang kontekstual sesuai kebutuhan lokal, didukung oleh fasilitas yang memadai seperti ruang multimedia dan akses internet. Namun, rendahnya kesadaran akan pentingnya perawatan fasilitas di tingkat sekolah menjadi kendala yang menghambat pemanfaatan optimal sarana dan prasarana. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala yang melibatkan kerja sama antara dinas dan sekolah agar aset pendidikan tetap layak pakai. Pengambilan keputusan berbasis data juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi lapangan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi. Partisipasi aktif masyarakat dan komite sekolah dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi strategi penting guna memastikan fasilitas yang dibangun sesuai kebutuhan serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam pemanfaatannya.

Hasil wawancara dengan informan 5, menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nabire adalah kurangnya tenaga ahli atau staf teknis yang kompeten dalam manajemen aset pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia ini menghambat efektivitas perencanaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset, sehingga beberapa program menjadi kurang efisien dan tidak berkelanjutan. Padahal, pengelolaan infrastruktur pendidikan yang baik sangat penting untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah, memberikan peluang yang setara bagi siswa, dan memperkuat keadilan dalam sistem pendidikan. Sebagai upaya penguatan tata kelola, Dinas Pendidikan melakukan analisis data evaluasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program, yang kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan. Selain itu, inventarisasi barang milik daerah secara berkala dilakukan untuk memantau kondisi dan keberadaan aset, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan atau penumpukan aset yang tidak optimal dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6, dapat diketahui bahwa Penerapan manajemen sarana dan prasarana yang baik di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire berdampak positif pada efisiensi penggunaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui perencanaan dan distribusi fasilitas yang tepat sasaran. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan akses di wilayah terpencil membutuhkan strategi distribusi yang adaptif dan kerja sama lintas sektor. Dinas Pendidikan secara aktif menindaklanjuti hasil evaluasi dengan program perbaikan, penganggaran yang tepat, serta penghapusan aset tidak layak untuk menjaga efektivitas dan akurasi inventaris. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lokal dalam perencanaan dan pengawasan meningkatkan akuntabilitas dan rasa tanggung jawab bersama.

Pembahasan

1. Bagaimana Penerapan Manajemen Sarana Prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire?

Penerapan manajemen sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan perencanaan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, inventarisasi, hingga pelaporan. Perencanaan berbasis analisis kebutuhan dan penyesuaian anggaran yang realistis memastikan alokasi sumber daya tepat sasaran. Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemeliharaan dan inventarisasi rutin menjaga kondisi fasilitas agar optimal dan berumur panjang, sementara penghapusan aset rusak mendukung keberlanjutan pengelolaan. Manajemen yang menyeluruh ini berdampak positif pada kualitas pendidikan dengan menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif dan efisien. Untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas manajemen, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar stakeholder, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang responsif terhadap perubahan kebutuhan.

2. Bagaimana upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dalam meningkatkan Kepuasan Publik?

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kepuasan publik melalui peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan sarana prasarana memadai, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Akses pendidikan yang merata terutama di daerah terpencil menjadi prioritas untuk menjamin keadilan dan pemerataan kesempatan belajar. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi juga menjadi fokus penting agar metode pembelajaran lebih efektif dan inovatif. Selain itu, Dinas Pendidikan mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembentukan karakter siswa dengan nilai moral dan sosial turut menjadi bagian dari pendidikan holistik yang diupayakan. Melalui kemitraan dengan berbagai stakeholder, termasuk orang tua, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, Dinas Pendidikan memperkuat akuntabilitas dan dukungan terhadap program pendidikan. Secara keseluruhan, upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kepuasan publik dan mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Nabire.

3. Faktor apa yang menghambat Penerapan Manajemen Sarana Prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire?

Penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nabire masih menghadapi berbagai hambatan signifikan, meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta minimnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat. Selain itu, kekurangan tenaga teknis yang kompeten juga menghambat proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset pendidikan. Hambatan tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih efektif berbasis prioritas, peningkatan sinergi antar lembaga, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga profesional. Dinas Pendidikan harus membangun sistem manajemen yang terintegrasi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan melakukan edukasi kepada semua pihak agar sarana dan prasarana pendidikan dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkelanjutan. Tanpa intervensi strategis terhadap hambatan ini, upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire akan sulit tercapai.

KESIMPULAN

1. Penerapan manajemen sarana dan prasarana oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mencakup tahapan perencanaan berbasis kebutuhan dan anggaran, pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta pengelolaan yang mencakup distribusi, pemeliharaan, hingga pelaporan. Manajemen yang efektif ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan secara menyeluruh.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire berupaya meningkatkan kepuasan publik melalui peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses pendidikan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, penerapan inovasi pembelajaran, pembentukan karakter siswa, serta menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder. Upaya ini menunjukkan komitmen dinas dalam menyediakan layanan pendidikan yang lebih merata, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Penerapan manajemen sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, rendahnya pemahaman tentang pentingnya sarana prasarana, serta kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Hambatan-hambatan ini menghambat efektivitas pengelolaan dan berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Armstrong, M. (2021). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page. 115-117.
- Creswell, John W & J. David Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Dessler (2021) Dessler, G. (2021). *Human Resource Management*. Pearson.
- Fitzgerald & Aitken (2022) Fitzgerald, L., & Aitken, R. (2022). *Public Service Quality and Public Satisfaction*. Routledge.
- Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 32-42. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872>
- Kumar, V. (2022). "Public Satisfaction and Service Quality". *Journal of Public Administration*.
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 2(1), 45-51. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i1.226>
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2021). *Fundamentals of Human Resource Management*. McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 101-107. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>

- Rizal, A. (2022). "Kepuasan Publik dalam Pelayanan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2022). *Service Quality and Customer Satisfaction*. Andi.
- Torrington, D., Hall, L., & Taylor, S. (2021). *Human Resource Management*. Pearson.
- Salombe, A., Rantererung, C. L., & Lambe, K. H. P. (2025). PENGARUH SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 93-100. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/863>
- Santoso, H. (2023). "Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Nabire". *Jurnal Pendidikan Indonesia*.